

Peran UNHCR dalam Pasar Tenaga Kerja bagi Pengungsi Ukraina

Rika Suparnika

Universitas Parahyangan, Indonesia

Email: aqeeladewi88@gmail.com

Keywords	Abstract
UNHCR; Refugees; labor market	<i>Crucial conditions in refugee camps often lead to refugees' material needs not being adequately met, despite various aid programs provided by UNHCR. These limitations drive refugees to seek employment, making the labor market a crucial issue, especially when the duration of their stay is uncertain. This study aims to analyze the role of UNHCR in facilitating access to the labor market for Ukrainian refugees. It uses a qualitative methodology with a desk study approach, analyzing secondary data from UNHCR, ILO, scientific journals, and other relevant sources. The findings indicate that UNHCR plays a crucial mediating role by acting as a communication bridge between Ukrainian refugees and host countries. This role is realized through strategic collaborations with the International Labour Organization (ILO) and the International Organization for Migration (IOM), resulting in programs such as "Train to Hire" and joint guidance. The implications of this study emphasize that the effectiveness of global governance depends heavily on the ability of non-state actors such as UNHCR to mobilize resources and bridge interests, while also confirming that fulfilling refugees' economic rights is an integral component of the concept of human security.</i>

Kata kunci	Abstrak
UNHCR; pengungsi; pasar tenaga kerja.	Kondisi krusial di lingkungan pengungsian seringkali menyebabkan kebutuhan materil pengungsi tidak terpenuhi secara memadai, meskipun berbagai bantuan telah disalurkan oleh UNHCR. Keterbatasan ini mendorong pengungsi untuk mencari pekerjaan, menjadikan pasar tenaga kerja sebagai isu krusial, terutama ketika durasi pengungsian tidak dapat dipastikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UNHCR dalam memfasilitasi akses pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, menganalisis data sekunder dari laporan UNHCR, ILO, jurnal ilmiah, dan sumber relevan lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memainkan peran mediasi yang krusial dengan bertindak sebagai jembatan komunikasi antara pengungsi Ukraina dan negara-negara penerima. Peran ini diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan International Labour Organization (ILO) dan International Organization for Migration (IOM), yang menghasilkan program-program seperti "Train to Hire" dan panduan bersama. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola global (<i>global governance</i>) sangat bergantung pada kemampuan aktor non-negara seperti UNHCR dalam memobilisasi sumber daya dan menjembatani

kepentingan, sekaligus mengukuhkan bahwa pemenuhan hak ekonomi pengungsi merupakan komponen integral dari konsep keamanan manusia (*human security*).

PENDAHULUAN

Dampak dari adanya invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina telah berdampak signifikan terhadap kegiatan imigrasi penduduk Ukraina ke berbagai negara sekitar Kawasan Eropa. menurut analisis data pada tahun 2022 diperkirakan jumlah pengungsi telah mencapai 330.000 orang telah meninggalkan Ukraina menuju negara tetangga setiap minggunya. Bahkan perkiraan hingga akhir tahun 2022 jumlah warga yang meninggalkan Ukraina mencapai 8,3 juta jiwa (Botelho, 2022). Hubungan diplomatic negara Ukraina dengan negara lain disekitarnya memberi keuntungan bagi warga Ukraina yang bermigrasi dalam tujuan mencari pengungsian, meskipun demikian pada proses imigrasi para warga Ukraina yang ingin mengungsi ke berbagai negara Eropa sekitar tetap melalui prosedural dan sesuai dengan kuota pengungsi yang ditentukan oleh negara penerima. Berdasarkan data kegiatan imigrasi Polandia telah menjadi negara tujuan pengungsi dengan angka presentase mencapai 53% dari keseluruhan jumlah pengungsi yang bermigrasi ke berbagai negara di Eropa pada tahun 2022 (Botelho, 2022). Lalu data selanjutnya yang diambil pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan pengungsi yang bermigrasi menuju Polandia, hingga mencapai 2 juta jiwa (Gromadzki & Lewandowski, 2023). Meskipun dari berbagai data tersebut terlihat kesempatan warga Ukraina untuk bisa menyelamatkan diri ke berbagai negara sekitar Eropa telah terjamin, namun masalah lain yang krusial seperti kebutuhan harian dan masa depan para pengungsi menjadi permasalahan baru.

Penentuan negara tujuan pengungsian tidak bisa dilepaskan dari peluang kondisi ekonomi, kebutuhan materil selama berada dipengungsian, membuat para pengungsi menjadi selektif memilih negara penerima untuk dapat menjamin kondisi ekonomi mereka selama dipengungsian. Hal ini akhirnya menjadi dilemma baru yang mendorong pengungsi memilih negara maju dengan pengeluaran yang relatif tinggi sebagai tujuan pengungsian. Konsekuensi lain yang harus dihadapi pengungsi dengan tujuan negara maju adalah persaingan ketat pada pasar tenaga kerja, sehingga kesempatan untuk bersaing dalam mendapat pekerjaan dengan penduduk asli menjadi lebih rumit. Kondisi akses pasar tenaga kerja juga tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat terutama dengan kondisi pengungsi yang banyak bermasalah dengan dokumen minim. Perbedaan unsur budaya hingga bahasa juga menjadi kendala yang sering menghalangi pengungsi untuk bisa mengakses pasar tenaga kerja dengan cepat, hal ini karena para pengungsi akhirnya memerlukan waktu lebih untuk pembekalan hingga pelatihan bahasa hingga pelatihan untuk menyesuaikan skill para pengungsi seperti bahasa dan keterampilan lainnya dengan kebutuhan negara dimana mereka mengungsi (Muna and Mukti, no date; Pautan, 2023; Lestari and Sinambela, 2024).

Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Ukraina Di Polandia Akibat Perang Rusia–Ukraina Tahun 2022

Dari kondisi yang problematic diperlukan keterlibatan berbagai otoritas Eropa dalam pengawasan dan penentuan kebijakan pasar tenaga kerja, karena permasalahan antar pengungsi dengan penduduk asli yang terkadang sulit dihindari, terutama terhadap pengungsi wanita yang jumlahnya juga cukup tinggi, ini menyebabkan kondisi yang sulit bagi pengungsi untuk berintegrasi ke dalam pasar tenaga kerja negara tujuan. Masuknya pengungsi Ukraina menyebabkan peningkatan bertahap pada jumlah tenaga kerja di kawasan Eropa, yang otomatis berpengaruh pada persaingan pasar tenaga kerja di kawasan Eropa. Meskipun tetap memiliki aspek positif dari kegiatan migrasi para pengungsi dalam pasar tenaga kerja namun ketidakpastian waktu peperangan juga mempengaruhi keberadaan mereka di negara penerima seperti dorongan akan kebutuhan izin tinggal, tempat tinggal dan kebutuhan materil lainnya. Proses imigrasi pengungsi dalam hal formal seperti berkas identitas hingga izin tinggal juga merupakan hal yang harus diperhatikan untuk mendukung pengungsi mendapat izin tinggal hingga posisi dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini saling berkaitan dengan masa depan perekonomian para pengungsi untuk membangun kehidupan mereka setelah bermigrasi (Wijayanti, 2024; Merbawono, 2025).

Permasalahan utama dari pengungsian adalah kebutuhan ekonomi yang menjadi pendorong utama kebutuhan pengungsi terhadap pekerjaan, maka sebagai organisasi internasional PBB yang bertugas melindungi dan membantu pengungsi United Nation High Commissioner For Refugees (Selanjutnya UNHCR) juga memiliki peran untuk membantu para pengungsi dalam pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja bukan hal mudah bagi para pengungsi terutama mengingat adanya berbagai peraturan dinegara penerima yang bisa membatasi peluang mereka dalam pasar tenaga kerja, peran UNHCR sebagai mediator antara pengungsi dan negara tujuan pengungsi diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi para pengungsi Ukraina. Dengan berbagai kegiatan UNHCR seperti pembekalan kemampuan hingga pembahasan tentang peraturan yang diajukan negara penerima kepada pengungsi menjadi sangat penting bagi para pengungsi. Peran UNHCR sebagai mediator menjadi sangat penting dalam komunikasi antara pengungsi dan negara penerima untuk menentukan masa depan pengungsi di negara penerima dalam bidang ekonomi dan pasar tenaga kerja. Ketersediaan pekerjaan bagi pengungsi menjadi fokus penting dalam perbaikan ekonomi pengungsi sekaligus memberi manfaat langsung bagi negara penerima.

Hingga tahun 2026 pengungsi Ukraina di negara Jerman saja telah mencapai 1,33 juta lebih (Statista Research Department, 2026), selanjutnya berdasarkan data lain sejak 2024 dicatat sekitar 14 juta orang populasi ukraina meninggalkan Ukraina dalam masa peperangan (VOA & AFP, 2024). Tingginya jumlah pengungsi pada masa peperangan menjadikan berbagai perbatasan penuh dengan pengungsi yang ini segera mendapatkan akses imigrasi, beruntungnya negara-negara sekitar Ukraina seperti Jerman, Polandia, Ceko dan Romania bergerak cepat dalam penerimaan pengungsi sehingga penumpukan pengungsi tidak terpusat pada satu perbatasan. Kesiapan negara-negara sekitar membantu warga Ukraina untuk mendapatkan pengungsian perlu mendapat apresiasi, Polandia sebagai negara tujuan utama pengungsi bahkan menyediakan fasilitas kesehatan

dan pendidikan bagi para pengungsi, namun beberapa negara lain tidak memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Ketidak merataan fasilitas bagi pengungsi menjadi tantangan bagi UNHCR untuk mampu menyamaratakan fasilitas pengungsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah: "Bagaimana peran UNHCR dalam membantu pengungsi Ukraina mengakses pasar tenaga kerja?" Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk peran mediasi yang dilakukan UNHCR, (2) menganalisis kolaborasi UNHCR dengan organisasi internasional lainnya seperti ILO dan IOM, dan (3) mengevaluasi dampak dari peran tersebut terhadap kondisi ekonomi pengungsi Ukraina. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus tentang tata kelola global migrasi dengan menyoroti efektivitas aktor internasional non-negara dalam isu ekonomi yang sangat sensitif seperti pasar tenaga kerja. Secara praktis, penelitian ini menyediakan bukti empiris bagi para pembuat kebijakan di negara-negara penerima dan organisasi internasional mengenai strategi yang efektif untuk integrasi ekonomi pengungsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan masalah penelitian yang berfokus pada peran UNHCR dalam pasar tenaga kerja pengungsi Ukraina sebagai mediator antara pengungsi dan negara penerima, sehingga penelitian akan menggunakan berbagai data studi pustaka, jurnal ilmiah, buku serta berbagai informasi online terkait permasalahan penelitian dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terjadinya invasi militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari memicu migrasi paksa terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II yang telah menjadi konflik internasional yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rusaknya infrastruktur umum dan permukiman warga telah mengakibatkan kerugian materil yang harus dihadapi oleh masyarakat sebagai dampak dari peperangan. Kondisi negara pasca invasi militer yang kacau balau mendorong warga Ukraina untuk mengevakuasi diri ke negara lain untuk menyelamatkan diri dari ancaman peperangan yang masih mengancam keselamatan mereka. Kegiatan migrasi yang bertujuan untuk memberikan keamanan nyatanya menimbulkan permasalahan baru bagi para pengungsi di negara penerima, permasalahan seperti kemana dan bagaimana mereka bisa mengungsi dalam kondisi negara yang genting. Selaian permasalahan tersebut dalam realita pengungsian masalah lain kerap bermunculan seiring ketidakpastian waktu peperangan, meskipun berbagai kebutuhan pengungsi seperti makanan, hingga fasilitas kesehatan telah diakomodir oleh UNHCR namun pengungsi tetap membutuhkan pekerjaan untuk bertahan di dalam pengungsian terutama mengingat waktu konflik antara Ukraina dan Rusia yang tidak terprediksi. Migrasi warga Ukraina didominasi oleh kaum Wanita, anak-anak hingga lansia, angka

kegiatan imigrasi pun terus mengalami peningkatan seiring kondisi peperangan yang mengalami eskalasi.

Kehidupan pengungsian yang tidak mudah mendorong para pengungsi untuk mencari solusi jangka panjang meski hidup dalam ketidakpastian, kesempatan mereka untuk berintegrasi dalam lingkup masyarakat lokal yang terbatas dan kesempatan mereka untuk bisa berinteraksi di negara penerima yang terbatas menjadi kendala dasar yang seringkali dihadapi oleh para pengungsi. Namun kebutuhan harian dan kondisi perekonomian para pengungsi tidak mungkin bisa berpasrah pada keadaan yang terjadi, banyak pengungsi yang berusaha untuk segera mendapatkan pekerjaan sebagai upaya bertahan jangka panjang. Namun kondisi negara pengungsian tidak selalu kondusif untuk para pengungsi mendapat pekerjaan, kondisi ekonomi hingga respon warga lokal dengan keberadaan pengungsi berpengaruh besar bagi kesempatan pengungsi untuk mendapat pekerjaan, ketersediaan pasar tenaga kerja yang layak juga sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi para pengungsi. Berbagai problematika yang dihadapi oleh pengungsi dalam pasar tenaga kerja menjadi sangat memprihatinkan apalagi jika harus dihadapkan dengan berbagai diskriminasi sosial yang dihadapi pengungsi.

Maka daripada itu kondisi para pengungsi dalam pasar tenaga kerja membutuhkan perhatian, salah satu hal yang memprihatinkan adalah kondisi sebagian warga lokal yang menganggap keberadaan pengungsi sebagai ancaman dalam persaingan pasar tenaga kerja, hal ini terjadi pada pengungsi Ukraina di Polandia yang mengalami diskriminasi, hal ini didasarkan pada kondisi warga lokal yang merasa bahwa keberadaan dari para pengungsi menjadi ancaman ataupun saingan dalam keseharian mereka. Status sebagai pengungsi juga membuat para warga Ukraina berada dalam kondisi “*Shadow Economy*”, kondisi ini berpengaruh besar dalam kehidupan para pengungsi terutama dalam bidang pasar tenaga kerja yang menjadi tidak pasti status pekerja mereka dikarenakan tidak adanya kontrak kerja yang mengikat. Hal tersebut memiliki risiko tinggi bagi para pengungsi, terutama dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang tidak ditunaikan bagi para pengungsi, hal ini menjadi rumit karena satu sisi mereka tetap membutuhkan pekerjaan namun satu sisi lain mereka juga dirugikan dengan kondisi yang mungkin merugikan mereka kapanpun. Selain itu kualifikasi keterampilan yang lebih tinggi terkadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia membuat pengungsi kesulitan untuk menyesuaikan antara kemampuan dengan pekerjaan, hal ini banyak terjadi pada bidang pekerjaan akuntan dan pengacara. Selain itu proses validasi pendidikan dan kemampuan di negara penerima seperti Polandia menjadi salah satu rintangan bagi para pengungsi (Radosław Zyzik, Łukasz Baszczak, Iga Rozbicka, 2024).

Diskriminasi terhadap pengungsi juga dijelaskan oleh pengungsi Ukraina dalam sebuah wawancara yang dipaparkan oleh pengungsi bahwa gaji yang mereka terima tidak sesuai, lalu beban kerja yang lebih besar daripada warga lokal, hingga para pengungsi merasa menjadi korban dari permasalahan eksploitasi dalam pasar tenaga kerja “*There’re some people at my work who earn very little, who are in a difficult situation. They go to the shop and there it just gets more and more expensive. And one of them says to me that it’s all because of the Ukrainians*”(Radosław Zyzik, Łukasz Baszczak, Iga Rozbicka,

2024). seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi dilemma antara kebutuhan akan pekerjaan dan kemungkinan untuk mendapat perlakuan tidak menyenangkan akhirnya menjadi polemic bagi para pengungsi. Hal-hal demikian menjadi salah satu tanggungjawab bagi UNHCR sebagai mediator para pengungsi dengan negara untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menemukan suatu solusi yang tepat bagi kedua belah pihak. Dalam permasalahan ini upaya UNHCR selain mediasi dengan negara penerima pengungsi, ialah melakukan sebuah kerjasama dengan *intergovernmental organization* lain seperti *International Labour Organization* yang memang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga aktor yang terlibat diharapkan memiliki pengaruh besar untuk mencapai solusi terbaik bagi seluruh pihak.

UNHCR bersama ILO

Keseriusan UNHCR dalam menangani problematika pasar tenaga kerja bagi pengungsi diwujudkan dalam berkolaborasi bersama *International Labour Organization* (selanjutnya ILO), kegiatan kolaborasi yang dilakukan UNHCR bersama ILO berputar pada konsep penyediaan pasar tenaga kerja yang kondusif untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Keseriusan kedua lembaga ini juga ditunjukkan dalam pertemuan tingkat tinggi menjelang forum pengungsi global pada Desember 2023, dengan fokus pembahasan mengenai langkah-langkah konkret untuk penanganan pengungsi dalam pasar tenaga kerja. Kegiatan kolaborasi yang dilakukan UNHCR bersama ILO hanyalah salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan oleh UNHCR untuk memperjuangkan hak para pengungsi sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak meski bukan di negara asal mereka. ketersediaan pasar tenaga kerja bagi para pengungsi menjadi indikator kualitas kehidupan para pengungsi, untuk memenuhi berbagai kebutuhan materil pengungsi selama waktu mengungsi yang tidak dapat dipastikan (Ott, 2013).

Kolaborasi antara UNHCR dengan ILO mengenai pasar tenaga kerja bagi para pengungsi telah menghasilkan suatu panduan yaitu *Improving Lives: A UNHCR on Partnering with ILO* dan *Guide ILO 101 Guide: Organization values, policy areas, and key programmes and tools in refugee and other displacement contexts* terbitan ILO. Secara garis besar keduanya merupakan panduan terhadap hak pengungsi terutama dalam pasar tenaga kerja, untuk memberikan suatu arahan dalam kegiatan pekerjaan dinegara pengungsian. Komitmen ini tidak terlepas dari kesepakatan UNHCR dan ILO pada tahun 2004 yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian bagi para pengungsi paksa melalui kegiatan pengembangan keterampilan, kewirausahaan dan pengetahuan tentang keuangan mikro (UNHCR, 2022). Adanya kegiatan dan pedoman ini diharapkan dapat memberikan perubahan bagi kondisi pengungsi dalam suatu pengungsian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan materil mereka yang tidak selalu dapat terpenuhi oleh bantuan-bantuan dari lembaga.

Sebagai lembaga internasional ILO telah menerbitkan prinsip-prinsip dalam rekomendasi *Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation*, 2017 (No. 205) pada *International Labour Conference* (ILC). Dalam panduan ini dijelaskan juga bahwa pengungsi memiliki hak sebagai pekerja dalam pekerjaan yang

layak (ILO, 2022), yang berarti keberadaan pengungsi di suatu negara tidak melepaskan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja. Tindak lanjut peran UNHCR bekerjasama dengan ILO adalah menjadi salah satu sponsor dalam bidang tematik untuk pekerjaan dan mata pencaharian. Kegiatan rutin kedua organisasi ini banyak berfokus pada pemberian akses pekerjaan yang layak bagi pengungsi, melatih produktifitas dan kewirausahaan sebagai strategi berkelanjutan bagi masyarakat lokal tuan rumah dan pengungsi, sehingga hubungan antara warga lokal dan pengungsi bisa lebih banyak terjalin dalam kegiatan positif bersama sehingga dapat memperbaiki stigma diantara keduanya. Kerjasama antara UNHCR dan ILO mencakup beberapa point, diantaranya (UNHCR, 2022):

- a. Mempromosikan hak-hak ditempat kerja dan mencegah pekerja anak.
- b. Menginformasikan dan memberdayakan pengungsi untuk mengakses pekerjaan layak.
- c. Mempromosikan keterampilan dan pembelajaran yang berkelanjutan bagi pengungsi dan masyarakat tuan rumah.
- d. Membangun perdamaian melalui kesempatan kerja bagi pengungsi dan masyarakat tuan rumah.

Peran ILO dalam permasalahan pasar tenaga kerja pengungsi Ukraina sangatlah massif, dalam artikelnya ILO menjelaskan pengamatan dan data mereka mengenai kondisi pengungsi Ukraina masih memerlukan perhatian lembaga-lembaga terkait. Menurut laporan ILO pada April 2025 sekitar 60% pengungsi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka dinegara asalnya, meskipun terdapat kenaikan sebesar 28% dalam upah bagi para pengungsi yang bekerja namun sekitar 40% pengungsi masih hidup dibawah garis kemiskinan (ILO, 2025). Presentase data yang dijelaskan oleh ILO tersebut menggambarkan kondisi yang belum stabil antara sektor ekonomi dengan pasar tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam lingkup pengungsi dapat dikatakan rendah, kondisi ini akhirnya akan mempengaruhi aspek kehidupan lain bagi pengungsi seperti kesejahteraan dan kesehatan.

Dari data terbaru pada Juli 2025 yang dipublikasikan oleh UNHCR melalui website resmi mereka, sebuah inisiatif baru bersama badan migrasi PBB yaitu *International Organization of Migration* (selanjutnya IOM), dalam kegiatan ini mereka meluncurkan sebuah program untuk peningkatan kerja internasional bagi para pengungsi, kegiatan ini diberi nama "*Train to Hire*". Gagasan dalam program ini adalah untuk mengeksplorasi keterampilan dan pengalaman para pengungsi dalam pasar tenaga kerja sehingga kualitas-kualitas tersebut bisa diapresiasi dan menjadi manfaat bagi komunitas yang menerima mereka. Program ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat dari keberadaan pengungsi kepada negara penerima sehingga nilai solidaritas dapat menjadi kegiatan nyata yang saling menguntungkan. Salah satu negara yang menyambut program ini dan turut berpartisipasi adalah Australia yang langsung mendanai pada 22 bulan awal untuk membangun keterampilan kerja dan menyesuaikannya dengan peluang kerja internasional. Dalam laporan 2019-2023 sejumlah 183.000 pengungsi dengan

keterampilan telah menerima visa kerja di berbagai negara maju (UNHCR & Matthew Saltmarsh, 2025).

Dalam upaya menyediakan pasar tenaga kerja UNHCR bahkan bekerjasama dengan mitra swasta lokal untuk lebih banyak mendapat kesempatan kerja bagi para pengungsi, ini bertujuan untuk memaksimalkan peluang kerja bagi pengungsi, selain itu dengan aktor yang berpariatif diharapkan dapat memperluas jangkauan terhadap sektor industri. Tingginya angka pengungsi Ukraina juga menjadi faktor keseriusan UNHCR dalam pasar tenaga kerja, keberadaan pengungsi yang sering mengalami berbagai masalah dalam pengungsian mendorong inisiatif cepat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kerjasama UNHCR dengan IOM dalam *Train to Hire* memungkinkan kesempatan lebih luas bagi pengungsi mendapatkan pekerjaan yang tidak hanya terbatas dinegara sekitar Eropa. Kondisi perang antara Rusia dan Ukraina telah memicu kegiatan migrasi yang tinggi dalam waktu singkat, kondisi ini membuat UNHCR meminta dana senilai \$550,6 Juta pada Maret 2022 untuk menangani pengungsi, kondisi seperti ini tidak mungkin bisa terus ditangani oleh UNHCR dengan hanya mengandalkan sumbangan. Maka program transfer tenaga kerja dari pengungsian menjadi salah satu solusi terbaik dengan harapan memperbaiki ekonomi pengungsi sekaligus memberi manfaat nyata bagi negara penyelenggara pasar tenaga kerja.

Jauh sebelum kasus pengungsi Ukraina muncul, peran UNHCR dalam memperjuangkan hak-hak para pengungsi dalam pasar tenaga kerja juga ditandai dengan pembahasan akses pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan ke pasar tenaga kerja, yang secara eksplisit diakui dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Konvensi 1954 yang berkaitan dengan Status Orang Tanpa Kewarganegaraan. Dijelaskan bahwa pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan akan menikmati perlakuan yang sama sehubungan dengan hak-hak tempat kerja sebagai warga negara, terutama mengenai kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang promosi, pelatihan, jam kerja, istirahat, waktu luang dan liburan. Dijelaskan juga dalam pasal 33 (1) konvensi 1951 bahwa prinsip non-refoulement merupakan bagian dari hukum internasional sehingga mengikat semua negara, terlepas dari negara tersebut terlibat dalam konvensi 1951, Protokol 1967 atau instrumen hukum pengungsi atau hak asasi manusia internasional atau regional yang relevan lainnya (UNHCR, 2022).

Berbagai rujukan dan peraturan internasional mengenai hak-hak personal ataupun pengungsi sebagai pekerja merupakan upaya dasar untuk menegakan keadilan bagi setiap pekerja, sehingga diharapkan dapat terbebas dari perilaku buruk seperti diskriminasi dan eksploitasi dalam pasar tenaga kerja. Meskipun teori-teori ini telah menjadi rujukan dalam kegiatan pasar tenaga kerja, namun kenyataan lapangan tidak selalu sesuai dengan teori-teori tersebut. Maka daripada itu pelatihan teknis dan sosialisasi terhadap para pengungsi menjadi salah satu cara bagi UNHCR menjalankan tugasnya sebagai mediator bagi para pengungsi dan negara penerima. Karena dengan pelatihan bagi para pengungsi edukasi dapat dikembangkan lebih baik, selain itu menanamkan nilai tentang hak dan kewajiban pekerja bagi pengungsi menjadi penting untuk menghindari kegiatan eksploitasi dan diskriminasi dalam pasar tenaga kerja internasional. Hal ini bukanlah

tanpa alasan, penerimaan warga lokal terhadap pengungsi yang tidak selalu positif membuat pengungsi harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang tidak selalu supportif dengan keberadaan mereka sebagai pengungsi dengan kebutuhan akan pekerjaan yang layak.

Upaya UNHCR untuk memperjuangkan hak para pengungsi guna mendapat kesempatan dalam pasar tenaga kerja di negara penerima didukung juga dengan pasal 35(2) Konvensi Pengungsi 1951, yang menjelaskan mengenai tanggung jawab untuk mendaftarkan pengungsi dan menyediakan data statistik termasuk kondisi pengungsi, yang terletak pada Negara tuan rumah. Demikian pula, Negara tuan rumah bertanggung jawab untuk mengeluarkan dokumen identitas sipil dan perjalanan, serta dokumen relevan lainnya. Hal ini menjadi penting karena identifikasi pengungsi adalah kunci untuk negara mengetahui siapa saja yang tiba sehingga dapat difasilitasi akses bantuan dan perlindungan. Selain itu pendataan pengungsi juga akan mempermudah akses pengungsi pada pasar tenaga kerja sehingga dapat memberikan mereka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan juga dapat menekan perilaku diskriminasi antara warga lokal dan pengungsi. Peran UNHCR menjadi sangat penting dalam pasar tenaga kerja bagi pengungsi, karena lembaga yang mampu secara aktif melakukan koordinasi sebagai mediator dengan negara penerima adalah UNHCR dengan latarbelakang lembaga internasional.

Pada sebuah artikel laporan dijelaskan bahwa peran UNHCR sangat penting dalam kegiatan membantu pengungsi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi pengungsi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UNHCR ini disambut baik oleh negara-negara tetangga Ukraina di seluruh Eropa yang bersedia menyediakan akses status hukum, layanan, dan hak bagi para pengungsi Ukraina yang dilakukan hingga Maret 2026. Penerimaan yang baik dari negara-negara Uni Eropa terhadap para pengungsi terlihat dari pemrioritasan pengungsi Ukraina terhadap akses pasar tenaga kerja dengan peluang penghasilan yang sesuai dengan standar Uni Eropa dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Hal ini dilakukan Uni Eropa untuk membantu para pengungsi Ukraina agar segera mendapat akses ke berbagai fasilitas sosial lainnya (Mada, 2023). Kondisi ini menggambarkan adanya pengaruh yang besar dari berbagai sosialisasi dan pelatihan teknis bagi para pengungsi, selain itu keberhasilan ini tidak terlepas dari peran UNHCR sebagai mediator pengungsi dengan berbagai pihak penting, sehingga akhirnya komunikasi dan diskusi UNHCR dengan berbagai pihak tersebut menghasilkan suatu pencapaian positif bagi kondisi para pengungsi terutama dalam pasar tenaga kerja seperti yang ditujukan sejak awal.

Meskipun berbagai upaya telah menghasilkan banyak dampak positif dari negara penerima hingga warga lokal, namun UNHCR tetap konsisten melakukan koordinasi rencana respon regional Ukraina untuk tahun 2025 hingga 2026, dengan tujuan memperkuat akses pengungsi terhadap hak, pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial di negara tuan rumah, hingga inklusi sosial ekonomi dan kohesi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal, hal ini juga bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas ataupun konsistensi kondisi yang dihadapi oleh para pengungsi kepedannya (UNHCR,

2025). Selain itu konsistensi kontribusi UNHCR terhadap nasib para pengungsi Ukraina ini tidak terlepas dari kondisi peperangan di Ukraina yang masih belum dapat diprediksi sehingga banyak ketidakpastian dalam perjalanannya, dampaknya kondisi yang tidak pasti ini juga terlihat dari adanya peningkatan kedatangan pengungsi ke berbagai negara kawasan Eropa sehingga membuat peran UNHCR semakin diperlukan untuk menjadi negosiasi ataupun mediator antara negara penerima dan para pengungsi. Selain itu peran penting lain dari UNHCR diperlukan untuk dapat memonitor bagaimana kondisi para pengungsi mengenai hak dan kewajiban di negara penerima. Keberadaan UNHCR menjadi

KESIMPULAN

Kondisi peperangan telah menciptakan kondisi konflik dengan dampak berkepanjangan, rakyat yang menjadi korban harus berusaha menyelamatkan diri hingga mencari suaka keluar negeri seperti ke negara sekitar. Dalam pembahasan ini warga Ukraina menjadi pengungsi ke berbagai negara-negara Eropa untuk menyelamatkan diri dari konflik peperangan negaranya, namun ternyata menjalani kehidupan dalam pengungsian bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Berbagai kebutuhan harian yang sebagian besar membutuhkan kemampuan materil menuntut pemasukan keuangan dalam kondisi yang sulit, meskipun bantuan dari lembaga internasional seperti bantuan dari UNHCR mungkin didapatkan namun kebutuhan para pengungsi terus bertambah dan tidak mungkin hanya mengandalkan bantuan. Dengan kondisi yang mulai menjadi kompleks ditengah pengungsian suatu problematika baru akhirnya muncul yaitu kebutuhan akan pekerjaan yang layak. Namun pada kondisi yang tidaklah kondusif para pengungsi dibenturkan dengan berbagai permasalahan pada pasar lapangan kerja, seperti diskriminasi hingga eksploitasi, hal ini terjadi karena kebanyakan pengungsi tidak memiliki standar yang sesuai dengan negara penerima, seperti perbedaan bahasa, standarisasi pekerjaan yang berbeda, hingga kelengkapan dokumen yang sulit terpenuhi sebagai pengungsi.

Permasalahan para pengungsi yang rumit tidak bisa diselesaikan oleh pengungsi itu sendiri, mereka membutuhkan figur mediator untuk menjembatani aspirasi dan komunikasi mereka terhadap negara penerima pengungsi. Meskipun keberadaan pengungsi di negara penerima telah banyak diatur dalam hukum internasional, namun nyatanya kondisi teknis lapangan tak selalu sesuai dengan teori yang ada, sehingga dibutuhkan peran yang mampu mengawasi kelangsungan kehidupan para pengungsi untuk memastikan hak dan kewajiban mereka terpenuhi selama dipengungsian. Peranan ini dilakukan oleh UNHCR sebagai lembaga internasional yang berfokus pada penanganan pengungsi, keberadaan UNHCR dalam problematika pengungsi Ukraina bukan hanya memastikan mereka mendapat suaka atau pengungsian, UNHCR juga berupaya untuk menyediakan pasar tenaga kerja yang layak untuk para pengungsi. Berbagai upaya yang dilakukan UNHCR dalam fokus membangun kondisi pasar tenaga kerja yang kondusif bagi para pengungsi Ukraina adalah wujud dari komitmen terhadap berbagai kebijakan dan hukum internasional mengenai hak-hak pengungsi.

Secara garis besar kebutuhan para pengungsi untuk berkontribusi dalam pasar tenaga kerja merupakan upaya praktis pengungsi untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka selama tinggal dalam pengungsian, yang tidak mungkin hanya bergantung pada sumbangan atau bantuan pihak lain. Hal ini sudah semestinya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dengan ketersediaan akses pengungsi pada pasar tenaga kerja memungkinkan kehidupan pengungsi akan jauh lebih stabil dalam bidang ekonomi yang juga akan berdampak positif dalam aspek lainnya. Upaya UNHCR juga telah memberikan kesempatan bagi pengungsi yang mayoritas adalah kaum Wanita, mereka memiliki kesempatan berpartisipasi dalam sektor kerja manufaktur, perhotelan dan lainnya di negara tujuan seperti Polandia, Jerman dan Ceko, akses legalisasi yang diberikan oleh Uni Eropa sebagai hasil mediasi bersama UNHCR telah banyak membuka peluang besar bagi para pengungsi. Legalisasi pasar tenaga kerja bagi para pengungsi juga telah membantu negara-negara Eropa untuk mengatasi permasalahan minimnya tenaga kerja yang disebabkan oleh angka lansia yang tinggi. Meskipun masih banyak aspek yang belum tercapai dalam hal pasar tenaga kerja, namun pencapaian untuk mendapatkan akses legal bagi para pengungsi dalam pasar tenaga kerja telah menjadi kesempatan berharga dalam memperbaiki ekonomi para pengungsi

Berbagai kesempatan dan peluang yang diberikan kepada pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan merupakan dukungan jangka panjang bagi keberlanjutan mereka dalam pengungsian, meskipun hasil laporan ILO tahun 2025 tidak menunjukkan hasil yang memuaskan namun terdapat suatu progress yang massif dalam perjalanannya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa peran UNHCR sebagai mediator yang bertindak memperjuangkan hak pengungsi ukraina dalam pasar tenaga kerja cukup efektif, terlihat dari berbagai progress dan analisis data lapangan yang menjelaskan kondisi pengungsi Ukraina telah banyak terserap dalam pasar tenaga kerja Eropa. Selain itu berbagai sambutan baik dari negara-negara Uni Eropa untuk menerima keberadaan pengungsi Ukraina sebagai pekerja menjadi rekomendasi yang legal dalam penerapan hak-hak bagi para pengungsi dalam pasar tenaga kerja. Peran mediator UNHCR dalam pasar tenaga kerja juga menjadi contoh nyata pentingnya keberadaan global governance dalam menangani sebuah permasalahan internasional. Peran UNHCR sebagai mediator dalam mediasi bersama negara-negara untuk memperjuangkan hak pengungsi Ukraina juga menandakan pentingnya *value* dari konsep *human security* yang ternyata kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Botelho, V. (2022). *The impact of the influx of Ukrainian refugees on the euro area labour force*.
- Caballero-Anthony, M. (2016). *An introduction to non-traditional security studies: A transnational approach*. SAGE Publications.
<https://doi.org/10.4135/9781473972308>
- Gromadzki, J., & Lewandowski, P. (2023). Refugees from Ukraine on the Polish labour market. *Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka*, 154(3), 1–13.

<https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2353>

- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan teori hubungan internasional: Arus utama, alternatif, dan reflektifis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- International Labour Organization. (2022). *ILO 101 guide: Organizational values, policy areas, and key programmes and tools in refugee and other displacement contexts*.
- International Labour Organization. (2025). *High employment, low wages: The economic reality of Ukrainian refugees*. <https://www.ilo.org/resource/news/high-employment-low-wages-economic-reality-ukrainian-refugees>
- Lestari, R. D., & Sinambela, S. I. (2024). Analisis peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terhadap pengungsi Ukraina pada konflik Rusia-Ukraina 2022. In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (Senadimu)* (pp. 215–225).
- Mada, K. (2023, June 20). 41 perusahaan janji rekrut 251.680 pengungsi di Eropa. *Kompas.ID*.
- Merbawono, K. (2025). Double standard policy Hungaria terhadap pengungsi: Studi kasus pengungsi Ukraina dan Timur Tengah. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(2).
- Morales, F. G. (2022). *UN expert praises generosity towards Ukrainian refugees by Poland and urges Belarus and Poland to end pushbacks*. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.
- Muna, A. S. W., & Mukti, T. A. (n.d.). *Implementasi open door policy dalam menangani pengungsi Ukraina di Jerman: Implementation of the open door policy in handling Ukrainian refugees in Germany*.
- Ott, E. (2013). *The labour market integration of resettled refugees*. UNHCR.
- Pautan, A. (2023). *Keterbukaan Hungaria terhadap krisis pengungsi Ukraina 2022*.
- Radosław Zyzik, Łukasz Baszczak, Iga Rozbicka, & M. W. (2024). *Refugees from Ukraine in the Polish labour market: Opportunities and obstacles*.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2022). *Improving lives: A UNHCR guide*.
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2025). *Ukraine global appeal 2025 situation overview*.
- United Nations High Commissioner for Refugees, & Saltmarsh, M. (2025, July 28). *UNHCR dan IOM meluncurkan inisiatif “Train-to-Hire” untuk meningkatkan kesempatan kerja internasional bagi pengungsi*. UNHCR.
- Wijayanti, M. P. (2024). *Fungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam kasus krisis pengungsi di Ukraina akibat invasi Rusia tahun 2022–2023* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia].